



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 14 Tahun 2000

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa klasifikasi arsip merupakan bagian kegiatan ketatausahaan yang sangat penting dalam upaya menemukan kembali dengan cepat setiap arsip yang sewaktu-waktu diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 118/UM.002/Phb-87;
 - b. bahwa dengan telah dilakukannya penataan organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan serta perkembangan teknologi, perlu dilakukan penataan kembali Kode Klasifikasi Arsip dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 3151);
 3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 175 Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 118/UM.002/Phb-87 tentang Klasifikasi Arsip; dan seluruh ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP.**

Pasal 1

Kode Klasifikasi Arsip adalah kode pemisahan arsip atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada serta pengelompokan arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara yang satu dengan yang lain, dengan memberikan kode pengenal sesuai dengan masalah yang terkandung didalamnya.

Pasal 2

Tujuan Kode Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman untuk penyimpanan arsip agar dapat dengan mudah dan cepat diketemukan kembali apabila setiap saat diperlukan, dengan cara memberikan kode klasifikasi dalam bentuk penomoran pada setiap tulisan dinas yang masuk ke dalam atau ke luar dari lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 3

Susunan Kode Klasifikasi Arsip mengikuti sifat permasalahan sesuai tugas dan fungsi setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi Departemen Perhubungan yaitu :

- a. Klasifikasi fasilitatif, yang berkaitan dengan tugas penunjang;
- b. Klasifikasi substantif, yang berkaitan dengan tugas pokok.

Pasal 4

Permasalahan yang terdapat pada klasifikasi arsip baik klasifikasi fasilitatif maupun klasifikasi substantif dirinci ke dalam tiga unsur yaitu :

- a. induk masalah;
- b. pokok persoalan;
- c. anak persoalan.

Pasal 5

- (1) Induk masalah yang terdapat pada klasifikasi fasilitatif meliputi masalah Perencanaan (PR), Kepegawaian (KP), Keuangan (KU), Perlengkapan (PL), Penanaman Modal (PM), Hukum (HK), Umum (UM), Hubungan Masyarakat (HM), Kerjasama Luar negeri (KL), Pengawasan (PS), Pendidikan dan Latihan (DL), Penelitian dan Pengembangan (LT).
- (2) Induk masalah yang terdapat pada klasifikasi substantif meliputi masalah Angkutan Jalan (AJ), Perkeretaapian (KA), Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (AP), Angkutan Laut (AL), Angkutan Udara (AU), Pos dan Telekomunikasi (PT), Geofisika (GF), Klimatologi (KT), Meteorologi (ME), Search and Rescue (SR), Mahkamah Pelayaran (MP).

Pasal 6

- (1) Kode klasifikasi arsip di lingkungan Departemen Perhubungan menggunakan gabungan kode huruf dan angka.
- (2) Induk masalah diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan atau kependekan penyebutan induk masalah.
- (3) Pokok persoalan diberi kode angka secara berurutan dari 00, 10, 20, 30 dan seterusnya.
- (4) Anak persoalan diberi kode angka secara berurutan dari 1, 2, 3 dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka didepannya sesuai kode pokok persoalannya.

Pasal 7

Untuk pemberian kode klasifikasi atau penomoran pada setiap tulisan dinas kode huruf untuk pengenalan induk masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode, sedang kode angka untuk pokok persoalan dan anak persoalan ditempatkan pada bagian kedua dan ketiga dari susunan kode.

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan unit organisasi menghadapi adanya pokok persoalan atau anak persoalan yang belum tertampung dalam klasifikasi arsip yang ditempatkan dalam keputusan ini, dapat menambah pokok persoalan atau anak persoalan dengan pemberian kode nomor sebagai kelanjutan dari nomor terakhir dari tiap pokok persoalan dan anak persoalan yang bersangkutan.

Pasal 9

Rincian lengkap kode klasifikasi arsip di lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 10

Penyelenggaraan kearsipan pada unit organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan disesuaikan dengan klasifikasi arsip yang ditentukan dalam keputusan ini serta dapat merinci lebih lanjut terhadap kode klasifikasi arsip sesuai keperluan unit organisasinya.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Pebruari 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
2. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Dephub;
4. Kepala Pusat Data dan Informasi;
5. Ketua Mahkamah Pelayaran;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
7. Para Adpel Utama dan Adbandara Soekarno-Hatta;
8. Para Atase Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum & Organisasi



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM.
NIP. 120106134

TABEL KLASIFIKASI ARSIP

1. **KLASIFIKASI FASILITATIF**

PR PERENCANAAN

- 00 Peyusunan Rencana dan Program
 - 001 Perhubungan Darat
 - 002 Perhubungan Laut
 - 003 Perhubungan Udara
 - 004 Pos dan Telekomunikasi
 - 005 Badan-badan
 - 006 Umum

- 10 Pengendalian dan Pelaporan Program
 - 101 Perhubungan Darat
 - 102 Perhubungan Laut
 - 103 Perhubungan Udara
 - 104 Pos dan Telekomunikasi
 - 105 Badan-badan
 - 106 Umum

- 20 Analisa dan Evaluasi
 - 201 Perhubungan Darat
 - 202 Perhubungan Laut
 - 203 Perhubungan Udara
 - 204 Pos dan Telekomunikasi
 - 205 Badan-badan
 - 206 Umum

- 30 Tarif
 - 301 Perhubungan Darat
 - 302 Perhubungan Laut
 - 303 Perhubungan Udara
 - 304 Pos dan Telekomunikasi
 - 305 BBM dan Gas
 - 306 Umum

KP KEPEGAWAIAN

- 00 Tata Usaha Kepegawaian
 - 001 Data Perorangan/Status
 - 002 NIP/Kartu Pegawai
 - 003 Daftar Nominatif
 - 004 Penugasan/Penunjukan/Surat Perintah
 - 005 Penghargaan/Piala/Piagam
 - 006 Litsus
 - 007 Sumpah Pegawai
 - 008 Spesimen Tanda Tangan
 - 009 Statistik/Sensus
 - 010 Daftar Kepangkatan/Ranklist/DUK
 - 011 Paspor/Exit Permit/Fiscal/Izin ke Luar Negeri
 - 012 LP2P
 - 013 Cuti
 - 014 Perceraian/Rujuk
 - 015 Surat Kuasa
 - 016 Absensi

- 10 Perencanaan Kepegawaian
 - 101 Formasi Pegawai
 - 102 Lamaran/Penyaringan/Pengujian Kesehatan
 - 103 Calon Pegawai
 - 104 Penempatan
 - 105 Pengendalian Kepangkatan/Jabatan
 - 106 Dispensasi Jabatan
 - 107 Pendayagunaan/Pembinaan SDM
 - 108 Tenaga Kerja/Tenaga Ahli
 - 109 Penelitian Jabatan
 - 110 Evaluasi Kepegawaian
 - 111 Pembibitan Sarjana/Ikatan Dinas

- 20 Penggajian Pegawai
 - 201 Penggajian/KGB/Tunjangan Jabatan/Daftar Gaji
 - 202 Pendaftaran/Keluarga/Perkawinan/Anak/Karis/Karsu
 - 203 Uang Perangsang/Insentif/Honorarium
 - 204 Izin Kerja/Belajar/Jalan

- 30 Tata Mutasi
 - 301 Pengangkatan
 - 302 Kenaikan Pangkat
 - 303 Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan
 - 304 Pemindahan/Mutasi
 - 305 Peninjauan Masa Jabatan/Masa Kerja
 - 306 Perbantuan/Penarikan Kembali
 - 307 Kekayaan ABRI
 - 308 Impassing/Penyesuaian Ijasah
 - 309 Pemanggilan Pejabat
 - 310 Serah Terima Jabatan/Tugas

- 40 **Penilaian**
 - 401 Ujian Dinas
 - 402 Teguran/Peringatan/Penundaan Gaji/Pangkat
 - 403 Schorsing/Hukuman Jabatan
 - 404 Rehabilitasi/Permohonan Kerja Kembali
 - 405 Ijasah
 - 406 Jam Kerja/Disiplin
 - 407 DP3

- 50 **Kesejahteraan Pegawai**
 - 501 Kesehatan/Donor Darah
 - 502 Asuransi/Taspen/Askes
 - 503 Bantuan Pegawai/Dana Pegawai/Uang Duka
 - 504 Tabungan Pegawai
 - 505 Olah Raga/Kesenian
 - 506 Pembinaan Mental
 - 507 Orang Tua Asuh

- 60 **Pemberhentian dan Pensiun**
 - 601 Pemberhentian dengan hormat
 - 602 Pemberhentian tidak dengan hormat
 - 603 MPP
 - 604 Penetapan Uang Tunggu/Uang Muka Pensiun
 - 605 Pensiun
 - 606 Pensiun Janda/Duda/Anak
 - 607 Pensiun Meninggal Dunia
 - 608 Nominatif Pensiun

- 70 **Perkumpulan Pegawai/Non Pegawai**
 - 701 KORPRI/Serikat Pekerja
 - 702 Kewanitaan/Dharma Wanita
 - 703 Koperasi
 - 704 Forum Komunikasi (Forkom) PHB/Pramuka
 - 705 Ormas/Orpol

KU KEUANGAN

- OO Anggaran Rutin
 - 001 RAPBN/APBN
 - 002 DUK/DIK (Konsep, Persetujuan, ABT, Pergeseran/Perubahan DIK dan lain-lain)
 - 003 Tender (Berita Acara, Kontrak SPK, Penunjukan Langsung, Pekerjaan Langsung dan lain-lain)
 - 004 Permintaan, Pencairan, Dana, Gaji dan lain-lain
 - 005 SPP (Beban Tetap, Sementara, Gaji dan lain-lain)
 - 006 SPMU (Beban Tetap, Sementara, Gaji dan lain-lain)
 - 007 Uang Lembur
 - 008 SPJR/LKKA/LKKR/LPBP

- 10 Anggaran Pembangunan
 - 101 RAPBN/APBN
 - 102 DUP/DIP (Plafon Anggaran, Revisi DIP/PO dan lain-lain)
 - 103 Tender (Berita Acara, Kontrak, SPK, Penunjukan Langsung, Pekerjaan Lanjutan dan lain-lain)
 - 104 SPP (Beban Tetap, Sementara, Siap dan lain-lain)
 - 105 SPMU (Beban Tetap, Sementara, Siap dan lain-lain)
 - 106 SPJ (UYHD, Siap, Lanjutan)
 - 107 Laporan (Mingguan, Berkala, Bulanan, Phisik dan lain-lain)

- 20 Anggaran Pembangunan Bantuan Luar Negeri
 - 201 Re Embursement Kepada Negara/Badan Pemberi Bantuan
 - 202 SPP/SPM
 - 203 Pembukaan LC

- 30 Pendapatan/Penerimaan
 - 301 Pajak-pajak
 - 302 Pendapatan Bukan Pajak (Transfer, Rekening PUK, Kurs)
 - 303 Sewa Rumah Dinas
 - 304 Royalties

- 40 Perbendaharaan/Pembukuan/Verifikasi
 - 401 Perhitungan Anggaran/Pemeriksaan Kas
 - 402 Perbendaharaan (Tuntutan Ganti Rugi dan lain-lain)
 - 403 Bendaharawan/Pimpro dan lain-lain
 - 404 RKA
 - 405 Neraca
 - 406 Auditing
 - 407 Likwidasi

- 50 Umum
 - 501 Tagihan Dinas
 - 502 Tagihan Lainnya
 - 503 Privatisasi

PL PERLENGKAPAN

- 00 Analisa Kebutuhan
 - 001 Analisa Data
 - 002 Klasifikasi Data
 - 003 Rencana Kebutuhan

- 10 Pengadaan
 - 101 Rekanan/Penawaran
 - 102 Tender dan Kontrak/Prakwalifikasi, Penunjukan Pemenang
 - 103 Harga dan Mutu
 - 104 Pembelian/Pengadaan
 - 105 Penggunaan (Energi, Kendaraan)

- 20 Pembinaan/Pemeliharaan
 - 201 Pembinaan
 - 202 Distribusi
 - 203 Pemeliharaan/Pemeriksaan
 - 204 Rehabilitasi/Pemulihan
 - 205 Pergudangan

- 30 Inventarisasi
 - 301 Inventarisasi Umum/Mutasi Barang
 - 302 Barang-barang Bergerak
 - 303 Barang-barang Tidak Bergerak
 - 304 Standarisasi

- 40 Penghapusan
 - 401 Persiapan Penghapusan
 - 402 Usul Penghapusan
 - 403 Penilaian
 - 404 Pelelangan
 - 405 Standarisasi/Petunjuk Tekhnis Penghapusan
 - 406 Penetapan Penghapusan
 - 407 Penghibahan (Ruislag)
 - 408 Penjualan

PM PENANAMAN MODAL

00 Penanaman Modal Dalam Negeri

- 001 Perhubungan Darat
- 002 Perhubungan Laut
- 003 Perhubungan Udara
- 004 Pos dan Telekomunikasi
- 005 Umum

10 Penanaman Modal Asing

- 101 Perhubungan Darat
- 102 Perhubungan Laut
- 103 Perhubungan Udara
- 104 Pos dan Telekomunikasi
- 105 Umum

20 Penanaman Modal Patungan

- 201 Perhubungan Darat
- 202 Perhubungan Laut
- 203 Perhubungan Udara
- 204 Pos dan Telekomunikasi
- 205 Umum

30 Analisa dan Pengembangan

- 301 Pengumpulan Data
- 302 Analisa/Evaluasi
- 303 Laporan

HK HUKUM

- 00 Produk Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
 - 001 Undang-undang Dasar
 - 002 Ketetapan MPR
 - 003 Undang-undang
 - 004 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 005 Peraturan Pemerintah
 - 006 Keputusan Presiden
 - 007 Instruksi Presiden
 - 008 Peraturan Lainnya

- 10 Produk Departemen dan Non Departemen di luar Departemen Perhubungan
 - 101 Keputusan Bersama Menteri
 - 102 Peraturan Menteri
 - 103 Keputusan Menteri
 - 104 Instruksi Menteri
 - 105 Keputusan Direktur Jenderal
 - 106 Keputusan Gubernur

- 20 Produk Departemen Perhubungan
 - 201 Keputusan Bersama Menteri
 - 202 Keputusan Menteri
 - 203 Instruksi Menteri
 - 204 Keputusan Inspektor Jenderal
 - 205 Keputusan Direktur Jenderal
 - 206 Keputusan Kepala Badan

- 30 Perdata
 - 301 Tentang Orang
 - 302 Tentang Kebendaan
 - 303 Tentang Perikatan
 - 304 Tentang Pembuktian dan Kadaluwarsaan

- 40 Pidana
 - 401 Kejahatan
 - 402 Pelanggaran
 - 403 KKN

- 50 Perizinan
 - 501 Pemberian/Persetujuan
 - 502 Penolakan
 - 503 Peringatan
 - 504 Pencabutan

- 601 Organisasi (Evaluasi, Rencana, Penetapan Struktur)
- 602 Tata Laksana (Evaluasi, Rencana, Penetapan)
- 603 Pembakuan Sarana Kerja (Evaluasi, Rencana, Penetapan Sarana Kerja)

UM UMUM

00 Ketatausahaan

- 001 Kearsipan
- 002 Surat Menyurat
- 003 Sistem Tata Naskah
- 004 Pengiriman/Alamat/Stempel/Kode Pos
- 005 Risalah dan Reproduksi Rapim/Rapat Staf/Rakor
- 006 Laporan Bulanan Presiden
- 007 Laporan

10 Kerumahtanggaan

- 101 Ketertiban dan Keamanan
- 102 Izin Peminjaman (Alat-alat, ruangan, lapangan dll)
- 103 Perjalanan Dinas
- 104 Perumahan Dinas
- 105 Cleaning Service
- 106 Gedung/Perkantoran/Gudang
- 107 Jatah Beras
- 108 Pakaian Dinas/Tanda Pengenal
- 109 Listrik/PAM/Telepon

20 Keprotokolan

- 201 Appoitment, audenensi, menghadap
- 202 Kunjungan, undangan
- 203 Pelantikan, pengukuhan
- 204 Upacara
- 205 Peresmian
- 206 Rapat Kerja/Dinas
- 207 Ucapan

30 Bantuan Dinas

- 301 Bencana Alam/Musibah
- 302 Angkutan
- 303 Sumbangan/Bantuan

HM HUBUNGAN MASYARAKAT

00 Dokumentasi

- 001 Rekaman, Film, Slide dan Foto
- 002 Pameran
- 003 Penerbitan Majalah/Buletin/Brosur
- 004 Sayembara Penulisan, Festival, Spanduk dan Iklan
- 005 Pidato
- 006 Bibliotik/Bahan Pustaka, Peta, Pelayanan Keanggotaan, Laporan Perpustakaan

10 Pers dan Media Massa

- 101 Siaran Berita/Siaran Pers/Jumpa Pers
- 102 Kunjungan Wartawan/Peliputan
- 103 Surat Kabar/Guntingan Berita/Kliping
- 104 Radio dan Televisi

20 Antar Lembaga

- 201 Bahan Pertemuan Dengan Asosiasi

KL KERJASAMA LUAR NEGERI

- 00 Kerjasama Bilateral
 - 001 Perhubungan Darat
 - 002 Perhubungan Laut
 - 003 Perhubungan Udara
 - 004 Pos dan Telekomunikasi
 - 005 Umum

- 10 Kerjasama Multilateral
 - 101 Perhubungan Darat
 - 102 Perhubungan Laut
 - 103 Perhubungan Udara
 - 104 Pos dan Telekomunikasi
 - 105 Umum

- 20 Kerjasama PBB
 - 201 IMO
 - 202 ICAO
 - 203 WMO
 - 204 ITU
 - 205 UPU
 - 206 Umum

- 30 Kerjasama Non PBB
 - 301 ASEAN
 - 302 IATA, APAA, FAA, PATA
 - 303 COORDCOM/SEATAC
 - 304 IBRD, IGGI, IMF
 - 305 ESCAP, OECF, ICAA
 - 306 OPEC
 - 307 OKI
 - 308 APEC, GATT

PS PENGAWASAN

- 00 Pengawasan Kepegawaian
 - 001 Kantor Pusat
 - 002 Perhubungan Darat
 - 003 Perhubungan Laut
 - 004 Perhubungan Udara
 - 005 Pos dan Telekomunikasi
 - 006 Badan Litbang
 - 007 Badan Diklat
 - 008 Badan Meteorologi dan Geofisika
 - 009 Badan SAR Nasional
 - 010 Kantor Wilayah Perhubungan
 - 011 Mahkamah Pelayaran
 - 012 Badan Usaha Milik Negara
 - 013 Atase Perhubungan

- 10 Pengawasan Keuangan
 - 101 Kantor Pusat
 - 102 Perhubungan Darat
 - 103 Perhubungan Laut
 - 104 Perhubungan Udara
 - 105 Pos dan Telekomunikasi
 - 106 Badan Litbang
 - 107 Badan Diklat
 - 108 Badan Meteorologi dan Geofisika
 - 109 Badan SAR Nasional
 - 110 Kantor Wilayah Perhubungan
 - 111 Mahkamah Pelayaran
 - 112 Badan Usaha Milik Negara
 - 113 Atase Perhubungan

- 20 Pengawasan Peralatan
 - 201 Kantor Pusat
 - 202 Perhubungan Darat
 - 203 Perhubungan Laut
 - 204 Perhubungan Udara
 - 205 Pos dan Telekomunikasi
 - 206 Badan Litbang
 - 207 Badan Diklat
 - 208 Badan Meteorologi dan Geofisika
 - 209 Badan SAR Nasional
 - 210 Kantor Wilayah Perhubungan
 - 211 Mahkamah Pelayaran
 - 212 Badan Usaha Milik Negara
 - 213 Atase Perhubungan

- 30 Pengawasan Umum
 - 301 Kantor Pusat
 - 302 Perhubungan Darat
 - 303 Perhubungan Laut
 - 304 Perhubungan Udara
 - 305 Pos dan Telekomunikasi
 - 306 Badan Litbang
 - 307 Badan Diklat
 - 308 Badan Meteorologi dan Geofisika
 - 309 Badan SAR Nasional
 - 310 Kantor Wilayah Perhubungan
 - 311 Mahkamah Pelayaran
 - 312 Badan Usaha Milik Negara
 - 313 Atase Perhubungan
 - 314 Laporan Hasil Pemeriksaan
 - 315 Pengawasan Melekat

- 40 Pengawasan Proyek Pembangunan
 - 401 Kantor Pusat
 - 402 Perhubungan Darat
 - 403 Perhubungan Laut
 - 404 Perhubungan Udara
 - 405 Pos dan Telekomunikasi
 - 406 Badan Litbang
 - 407 Badan Diklat
 - 408 Badan Meteorologi dan Geofisika
 - 409 Badan SAR Nasional
 - 410 Kantor Wilayah Perhubungan
 - 411 Mahkamah Pelayaran
 - 412 Badan Usaha Milik Negara
 - 413 Atase Perhubungan

DL DIKLAT

- 00 Bina Program
 - 001 Diklat Darat
 - 002 Diklat Laut
 - 003 Diklat Udara
 - 004 Diklat Pos dan Telekomunikasi
 - 005 Diklat BMG
 - 006 Diklat Badan SAR Nasional
 - 007 Umum

- 10 Diklat Dalam Negeri
 - 101 Lemhanas
 - 102 Spati/Spamen
 - 103 Spama
 - 104 Adum
 - 105 Penataran/Training, penyuluhan, PKL
 - 106 Kursus
 - 107 Diklat Umum, Bea Siswa
 - 108 Seminar, lokakarya, kongres, konferensi
 - 109 Orientasi/Prajabatan

- 20 Diklat Luar Negeri
 - 201 Diklat Darat
 - 202 Diklat Laut
 - 203 Diklat Udara
 - 204 Diklat Postel
 - 205 Diklat Badan Meteorologi dan Geofisika
 - 206 Diklat Badan SAR Nasional
 - 207 Diklat Umum, Bea Siswa
 - 208 Seminar, loka karya, Kongres, Konferensi

- 30 Umum
 - 301 Laporan dan Evaluasi Pendidikan
 - 302 Wisuda
 - 303 Widyaiswara

LT LITBANG

00 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Perhubungan Nasional

- 001 Angkutan Darat
- 002 Angkutan Laut
- 003 Angkutan Udara
- 004 Pos dan Telekomunikasi
- 005 Umum

10 Penyusunan Rencana Penelitian dan Program Kerja

- 101 Angkutan Darat
- 102 Angkutan Laut
- 103 Angkutan Udara
- 104 Pos dan Telekomunikasi
- 105 Riset, survey, studi/Umum

20 Laporan dan Dokumentasi

- 201 Laporan dan Evaluasi
- 202 Dokumentasi dan Perpustakaan
- 203 Statistik dan Visualisasi

30 Pembinaan Tenaga Fungsional

- 301 Kursus Peneliti
- 302 Pendidikan Bergelar
- 303 Keterampilan Komputer

40 Penerapan Sarana dan Prasarana Angkutan

- 401 Darat
- 402 Laut
- 403 Udara
- 404 Umum

50 Pengumpulan dan Pengolahan Data

- 501 Angkutan Darat
- 502 Angkutan Laut
- 503 Angkutan Udara
- 504 Postel
- 505 Badan-badan, Kanwil, BUMN
- 506 Amdal
- 507 Umum

2. KLASIFIKASI SUBSTANTIF

AJ ANGKUTAN JALAN

- 00 Pembinaan Fasilitas
 - 001 Kebutuhan Fasilitas
 - 002 Rehabilitasi/Perawatan
 - 003 Perizinan
 - 004 Bina Usaha/KSO
 - 005 Pelayanan
 - 006 Bahan Bakar

- 10 Terminal
 - 101 Tanah/Lokasi
 - 102 Bangunan/Gedung
 - 103 Perlengkapan
 - 104 Status/Jenis
 - 105 Retribusi
 - 106 Terminal Umum/Pelataran/Parkir
 - 107 Terminal Khusus/Haji
 - 108 Jembatan Timbang/Uji Petik

- 20 Angkutan Penumpang
 - 201 Haji/Lebaran/Natal/Tahun Baru
 - 202 Turis/Pariwisata
 - 203 Transmigrasi
 - 204 Perintis
 - 205 Antar Kota/Propinsi
 - 206 Kota

- 30 Angkutan Barang
 - 301 Pos
 - 302 Minyak
 - 303 Log
 - 304 Ternak
 - 305 Sembilan Bahan Pokok
 - 306 Peti Kemas
 - 307 Muatan Umum

- 40 Keselamatan
 - 401 Rambu-rambu
 - 402 Kelaikan Kendaraan/Kir/Perakitan
 - 403 Fasilitas Keselamatan
 - 404 Tertib Lalu Lintas
 - 405 Pemilikan (BPKB, STNK/Nomor Kendaraan)
 - 406 Awak Kendaraan
 - 407 SIM
 - 408 Jembatan Penyeberangan

- 50 Kecelakaan/Gangguan
 - 501 Kecelakaan Penumpang
 - 502 Kecelakaan Barang
 - 503 Gangguan Sarana/Prasarana
 - 504 Pembajakan
 - 505 Pencemaran

- 60 Sarana Perawatan/Perbaikan
 - 601 Balai/Bengkel
 - 602 Suku Cadang

- 70 Umum
 - 701 Asuransi
 - 702 Asosiasi
 - 703 Satpam
 - 704 LLAJ
 - 705 Rally/Lomba

KA PERKERETAAPIAN

- 00 Pembinaan Fasilitas
 - 001 Kebutuhan Fasilitas
 - 002 Rehabilitasi/Perawatan
 - 003 Perizinan
 - 004 Bina Usaha/KSO
 - 005 Pelayanan
 - 006 Bahan Bakar

- 10 Terminal/Stasiun
 - 101 Tanah/Lokasi
 - 102 Bangunan/Gedung
 - 103 Perlengkapan
 - 104 Status/Jenis
 - 105 Retribusi
 - 106 Pelataran/Peron/Parkir
 - 107 Terminal Khusus

- 20 Angkutan Penumpang
 - 201 Haji/Lebaran/Natal/Tahun Baru
 - 202 Turis/Pariwisata
 - 203 Transmigrasi
 - 204 Perintis
 - 205 Antar Kota
 - 206 Kota
 - 207 Penyeberangan Kereta Api
 - 208 Angkutan Khusus
 - 209 Borongan

- 30 Angkutan Barang
 - 301 Pos
 - 302 Minyak
 - 303 Log
 - 304 Ternak
 - 305 Sembilan Bahan Pokok
 - 306 Peti Kemas
 - 307 Muatan Umum

- 40 Keselamatan
 - 401 Rambu-rambu/Sinyal
 - 402 Kelaikan Kereta Api/Perakitan
 - 403 Fasilitas Keselamatan
 - 444 Telekomunikasi
 - 405 Sertifikat
 - 406 Awak Kereta Api

- 50 Kecelakaan/Gangguan
 - 501 Kecelakaan Penumpang
 - 502 Kecelakaan Barang
 - 503 Gangguan Sarana/Prasarana
 - 504 Pembajakan
 - 505 Pencemaran

- 60 Sarana Perawatan/Perbaikan
 - 601 Balai Yasa/Dipo
 - 602 Suku Cadang
 - 603 Persyaratan Teknis
 - 604 Jalan Baja/Rel

- 70 Umum
 - 701 Asuransi
 - 702 Asosiasi
 - 703 SATPAM
 - 704 Industri

AP **ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

- 00 **Pembinaan Fasilitas**
 - 001 Kebutuhan Fasilitas
 - 002 Rehabilitasi/Perawatan
 - 003 Perizinan
 - 004 Bina Usaha/KSO
 - 005 Pelayanan
 - 006 Bahan Bakar

- 10 **Terminal/Dermaga**
 - 101 Tanah/Lokasi
 - 102 Bangunan/Gedung
 - 103 Perlengkapan
 - 104 Status/Jenis
 - 105 Retribusi
 - 106 Dermaga
 - 107 Dermaga Khusus

- 20 **Angkutan Penumpang**
 - 201 Haji/Lebaran/Natal/Tahun Baru
 - 202 Turis/Pariwisata
 - 203 Transmigrasi
 - 204 Antar Pulau
 - 205 Antar Desa

- 30 **Angkutan Barang**
 - 301 Pos
 - 302 Minyak
 - 303 Log
 - 304 Ternak
 - 305 Sembilan Bahan Pokok
 - 306 Muatan Umum

- 40 **Keselamatan**
 - 401 Rambu-rambu
 - 402 Kelaikan Kapal/Perakitan
 - 403 Fasilitas Keselamatan
 - 404 Reparasi Dok/Persyaratan Teknis
 - 405 Sertifikat/Pemilikan
 - 406 Awak Kapal

- 50 Kecelakaan/Gangguan
 - 501 Kecelakaan Penumpang
 - 502 Kecelakaan Barang
 - 503 Gangguan Sarana/Prasarana
 - 504 Pembajakan
 - 505 Pencemaran

- 60 Sarana Perawatan/Perbaikan
 - 601 Armada Pengerukan
 - 602 Suku Cadang
 - 603 Pengerukan Dermaga/Kolam Pelabuhan
 - 604 Pengerukan Alur Sungai/Alur Pelayaran

- 70 Umum
 - 701 Asuransi
 - 702 Asosiasi
 - 703 SATPAM
 - 704 Rally Sungai/Lomba

AL **ANGKUTAN LAUT**

- 00 **Pembinaan Fasilitas**
 - 001 Kebutuhan Fasilitas
 - 002 Rehabilitasi/Perawatan
 - 003 Perizinan
 - 004 Bina Usaha/KSO
 - 005 Pelayanan
 - 006 Bahan Bakar

- 10 **Terminal/Kepelabuhan**
 - 101 Tanah/Lokasi
 - 102 Bangunan/Gedung
 - 103 Perlengkapan
 - 104 Status/Jenis
 - 105 Retribusi
 - 106 Pelabuhan/Dermaga
 - 107 Pelabuhan Khusus/Dermaga

- 20 **Angkutan Penumpang**
 - 201 Haji/Lebaran/Natal/Tahun Baru
 - 202 Turis/Pariwisata
 - 203 Transmigrasi
 - 204 Penumpang Dalam Negeri
 - 205 Penumpang Luar Negeri

- 30 **Angkutan Barang**
 - 301 Pos
 - 302 Minyak
 - 303 Log
 - 304 Ternak
 - 305 Sembilan Bahan Pokok
 - 306 Peti Kemas/EMKL
 - 307 Muatan Umum
 - 308 Barang Dalam Negeri
 - 309 Barang Luar Negeri
 - 310 Bongkar Muat

- 40 **Keselamatan**
 - 401 Rambu-rambu/Mercu Suar
 - 402 Kelaikan Kapal/Pembuatan Kapal
 - 403 Fasilitas Keselamatan/Keamanan
 - 404 Telekomunikasi Pelayaran
 - 405 Sertifikat Kesempurnaan Kapal
 - 406 Awak Kapal

- 50 Kecelakaan/Gangguan
 - 501 Kecelakaan Penumpang/Kapal
 - 502 Kecelakaan Barang
 - 503 Gangguan Sarana/Prasarana
 - 504 Pembajakan/Penyelundupan
 - 505 Pencemaran

- 60 Sarana Perawatan/Perbaikan
 - 601 Armada Pengerukan
 - 602 Suku Cadang
 - 603 Pengerukan Kolam Pelabuhan
 - 604 Pengerukan Alur Pelayaran
 - 605 Reklamasi Pantai
 - 606 Pekerjaan Bawah Air (Salvage)

- 70 Umum
 - 701 Asuransi
 - 702 Asosiasi
 - 703 SATPAM
 - 704 Rally Perahu Layar/Lomba
 - 705 Penjagaan Pantai dan Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)

AU **ANGKUTAN UDARA**

- 00 **Pembinaan Fasilitas**
 - 001 Kebutuhan Fasilitas
 - 002 Rehabilitasi/Perawatan
 - 003 Perizinan
 - 004 Bina Usaha/KSO
 - 005 Pelayanan
 - 006 Bahan Bakar

- 10 **Terminal/Pelabuhan**
 - 101 Tanah/Lokasi
 - 102 Bangunan/Gedung
 - 103 Perlengkapan
 - 104 Status/Jenis
 - 105 Retribusi
 - 106 Pelabuhan/Bandara
 - 107 Pelabuhan Khusus/Bandara Haji

- 20 **Angkutan Penumpang**
 - 201 Haji/Lebaran/Natal/Tahun Baru
 - 202 Turis/Pariwisata
 - 203 Transmigrasi
 - 204 Penumpang Dalam Negeri
 - 205 Penumpang Luar Negeri
 - 206 Penumpang Khusus/Jembatan Udara
 - 207 Penumpang Borongan/Taxi Udara

- 30 **Angkutan Barang**
 - 301 Pos
 - 302 Muatan Dalam Negeri
 - 303 Muatan Luar Negeri
 - 304 EMKU

- 40 **Keselamatan**
 - 401 Rambu-rambu
 - 402 Kelaikan Pesawat/Perakitan/Kalibrasi
 - 403 Fasilitas Keselamatan/Kotak Hitam
 - 404 Telekomunikasi Penerbangan
 - 405 Sertifikat/Pemilikan
 - 406 Awak Pesawat

- 50 Kecelakaan/Gangguan
 - 501 Kecelakaan Penumpang
 - 502 Kecelakaan Barang
 - 503 Gangguan Sarana/Prasarana
 - 504 Pembajakan
 - 505 Pencemaran

- 60 Sarana Perawatan/Perbaikan
 - 601 Balai/Bengkel
 - 602 Suku Cadang
 - 603 Persyaratan Teknis

- 70 Umum
 - 701 Asuransi
 - 702 Asosiasi
 - 703 SATPAM
 - 704 Rally Udara/Lomba

GF GEOFISIKA

- 00 Kebutuhan Fasilitas
 - 001 Pembangunan fasilitas
 - 002 Rehabilitasi/Perawatan
 - 003 Pengembangan Fasilitas
 - 004 Tanah/Bangunan
 - 005 Instrumentasi
 - 006 Kalibrasi
 - 007 Operasional

- 10 Pengamatan
 - 101 Survey
 - 102 Gempa Bumi
 - 103 Magnit
 - 104 Lonosfera
 - 105 Listrik Udara
 - 106 Grafitasi
 - 107 Waktu
 - 108 Polusi Udara
 - 109 Astronomi
 - 110 Resistivity

- 20 Analisa
 - 201 Data Gempa Bumi
 - 202 Data Magnit
 - 203 Data Ionosfera
 - 204 Data Listrik Udara
 - 205 Data Grafitasi
 - 206 Data Waktu
 - 207 Data Polusi Udara
 - 208 Data Astronomi
 - 209 Data Resistivitas

- 30 Ramalan
 - 301 Geofisika
 - 302 Verifikasi/Evaluasi

- 40 Pelayanan Jasa dan Informasi
 - 401 Geofisika
 - 402 Konsultasi
 - 403 Khusus
 - 404 Gerhana

KT KLIMATOLOGI

- 00 Kebutuhan Fasilitas
 - 001 Pembangunan fasilitas
 - 002 Rehabilitasi/Perawatan
 - 003 Pengembangan Fasilitas
 - 004 Tanah/Bangunan
 - 005 Instrumentasi
 - 006 Kalibrasi
 - 007 Operasional

- 10 Pengamatan
 - 101 Survey/Observasi
 - 102 Permukaan Darat
 - 103 Permukaan Laut
 - 104 Permukaan Udara
 - 105 Khusus
 - 106 Monitoring

- 20 Analisa
 - 201 Peta Permukaan
 - 202 Udara Atas
 - 203 Khusus

- 30 R a m a l a n
 - 301 Iklim Jangka Pendek
 - 302 Iklim Jangka Sedang
 - 303 Iklim Jangka Panjang
 - 304 Musim
 - 305 Khusus (Pertanian Industri dll)
 - 306 Verifikasi/Evaluasi

- 40 Pelayanan Jasa dan Informasi
 - 401 Iklim
 - 402 Konsultasi
 - 403 Khusus

ME METEOROLOGI

- 00 Kebutuhan Fasilitas
 - 001 Pembangunan fasilitas
 - 002 Rehabilitasi/Perawatan
 - 003 Pengembangan Fasilitas
 - 004 Tanah/Bangunan
 - 005 Instrumentasi
 - 006 Kalibrasi
 - 007 Operasional

- 10 Pengamatan
 - 101 Survey
 - 102 Permukaan Darat
 - 103 Permukaan Laut
 - 104 Permukaan Udara
 - 105 Khusus
 - 106 Monitoring

- 20 Analisa
 - 201 Peta Permukaan
 - 202 Udara Atas
 - 203 Pragnosa
 - 204 Khusus

- 30 Ramalan
 - 301 Cuaca Jangka Pendek
 - 302 Cuaca Jangka Sedang
 - 303 Cuaca Jangka Panjang
 - 304 Khusus
 - 306 Verifikasi/Evaluasi

- 40 Pelayanan Jasa dan Informasi
 - 401 Cuaca
 - 402 Konsultasi
 - 403 Khusus

SR SEARCH AND RESCUE NASIONAL

00 Pembinaan Fasilitas

- 001 Kebutuhan Fasilitas
- 002 Rehabilitasi//Perawatan
- 003 Penggunaan Pesawat
- 004 Inventarisasi fasilitas/Kekayaan
- 005 Standarisasi Kebutuhan
- 006 Penyuluhan/Penataran SAR
- 007 Rapat Koordinasi Operasi

10 Penyediaan Jasa SAR

- 101 Operasi Darat
- 102 Operasi laut
- 103 Operaso Udara
- 104 Latihan Operasi
- 105 Biaya Operasi/Komunikasi

20 Umum

- 201 Pemeliharaan/Perbaikan
- 202 Ketatalaksanaan
- 203 Hukum dan Kerjasama
- 204 Evaluasi dan Laporan

- MP MAHKAMAH PELAYARAN
- 00 Pembinaan Fasilitas
 - 001 Kebutuhan Fasilitas
 - 002 Pengaduan
 - 003 Bahan Pengusutan
 - 10 Peradilan
 - 101 Sidang
 - 102 Keputusan
 - 103 Saksi/Pembuktian
 - 104 Hakim Pusat Peradilan
 - 105 Terdakwa/Tertuduh
 - 20 Umum
 - 201 Analisa dan Evaluasi
 - 202 Laporan

PT	POS DAN TELEKOMUNIKASI
00	Pembinaan
001	Kebutuhan Fasilitas
002	Rehabilitasi/Perawatan
003	Perizinan
004	Bina Usaha/KSO
005	Tanah/Bangunan
006	Iuran TV/Radio
10	Penyediaan
101	Pos dan Giro
102	Telepon
103	Teleks
104	Telegram/Telegraf
105	Faksimili
20	Pos dan Giro
201	Perangko/Benda Pos/Filateli
202	Jasa Pos
203	Jasa Giro
30	Pelayanan Telekomunikasi
301	Telegraf
302	Teleks
303	Telepon
304	Transmisi
305	Satelit
306	Stasiun Bumi
307	Frekuensi/Monitoring/Radio/TV/SSB
308	Faksimili
40	Umum
401	Gangguan Sarana/Prasarana
402	Laporan dan Evaluasi
403	Badan Pertimbangan Telekomunikasi
404	Asosiasi

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum & Organisasi



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM.
NIP. 120106134